



Siang-Malam, Bahas P-APBD

AMLAPURA - DPRD Karangasem sudah menerima rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun anggaran 2015, dari pihak eksekutif, Selasa (15/9). Setelah menerima rancangan P-APBD, melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Karangasem, dua hari lalu.

DPRD Karangasem bakal menggenjot pembahasannya. "Tidak akan mengurangi dari sisi efektivitas, pembahasan dilakukan siang dan malam," kata Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi usai rapat paripurna yang dihadiri Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda.

Sumardi mengakui, P-APBD ditarget ketok palu pada Jumat (25/9) mendatang. Melihat hal tersebut, politikus Partai Golkar ini memastikan bakal berimbas terhadap Pemilihan Perbekel (Pikel) yang rencananya dilakukan akhir Oktober. Dia menegaskan Pikel serentak yang pencoblosannya dijadwalkan 31 Oktober tahun ini, bakal tertunda.



KADEK MERTAWANRADAR BALI

NGEBUT: Penjabat Bupati Karangasem Ida Bagus Ngurah Arda (kiri) bersalaman dengan Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi.

Hitung-hitungannya, setelah ketok palu akhir September, masih harus verifikasi, memakan waktu minimal dua minggu. Setelah diverifikasi, mesti menunggu nomor, yang diperkirakan tuntas pertengahan Oktober. "Akhir Oktober sudah harus Pikel, bagaimana melakukannya. Sudah tidak mungkin. Kecuali Pikel Desember. Tapi tidak ada jadwal itu," tandas Sumardi. Terkait rancangan P-APBD itu, Ida Bagus Ngurah Arda, mengatakan, penyusunannya sudah berpegang pada prinsip-prinsip anggaran yang telah ditetapkan. Yakni rancangan peraturan daerah disusun berdasarkan format anggaran

defisit, dimana selisih antara pendapatan dan belanja lebih besar mengakibatkan terjadinya defisit anggaran yang bakal ditutupi dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA.

Arda menyebutkan, pendapatan daerah dalam anggaran induk 2015 direncanakan sebesar Rp 1.226.081.077.533, dirancang naik sebesar 11,73 persen, atau Rp 143.790.677.837. Sehingga menjadi Rp 1.369.871.755.370. Begitu juga dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan menjadi Rp 232.132.876.565. Naik 13,08 persen, dari PAD dalam anggaran induk sebesar Rp 205.273.392.704. **(wan/gup)**

Edisi : Kamis, 17 sept 2015

Hal : 37



Ada 127 Desa yang Macet

Pencairan Dana Desa Termin II

DENPASAR - Pencairan dana desa untuk sebagian desa di Bali masih tersendat. Jumlah desa yang belum mendapat kucuran dana tersebut sekitar 20 persen atau 127 desa dari jumlah desa yang jumlahnya 636. Walau demikian, kondisi ini masih lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia.

"Untuk termin pertama yaitu 40 persen sudah semuanya dapat. Tapi, yang termin kedua yang juga 40 persen belum semuanya cair," aku Kepala Badan Pemberdayaan Desa dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bali Ketut Lihadnyana dalam seminar terkait desa.

► Baca Ada... Hal 39



Pencairan Dana Desa di Bali

- Untuk termin I, yaitu 40 persen dari total dana desa yang digelontor untuk Bali tahun ini, sudah semuanya dapat (636 desa).
- Pada termin II, jumlah desa yang belum mendapat kucuran sekitar 20 persen atau 127 desa dari jumlah desa yang jumlahnya 636. Sehingga, dari total Rp 74 miliar yang harusnya sudah cair pada termin kedua, ini masih ada Rp 14,8 miliar yang belum sampai ke desa.
- Pencairan termin ketiga baru akan dilakukan November mendatang.

GRAFIS: GT DEWANTAR/RADAR BALI



ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

BAHAS DANA DESA: Prof. Wayan Suartana dari Unud menjadi salah satu pembicara dalam seminar dana desa di Kuta, kemarin.

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 29



Sambungan . . .

Siapkan Ratusan Pendamping

■ ADA

Sambungan dari hal 29

yang digagas LPPM Unud di Hotel Patra Jasa, Tuban, Kuta, kemarin (16/9).

Dalam seminar itu, menghadirkan sejumlah narasumber. Selain Lihadnyana, juga ada Prof. Wayan Suartana dari Unud, anggota Komisi XI Abdul Kharis Almasyhari; Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa, Mulyadin Malik; Roy John Salamony dari Kemendagri; Dekan Fisip Unud IGP Suka Arjawa dengan moderator I Gusti Wayan Murjana Yasa. Acara ini dibuka Wagub Ketut Sudikerta.

Menurut Lihadnyana, mestinya pada termin kedua dana desa yang dicairkan sudah 80 persen. Namun, masih ada kendala pada sejumlah desa, seperti di Klungkung. Sehingga, sampai September ini baru 72 persen dana desa untuk Bali yang nilainya Rp 185 miliar belum diterima desa. Kalau dikalkulasikan, maka nilai dana desa yang belum cair di termin kedua ini sebesar Rp 14,8 miliar, dari total dana desa di termin kedua sebesar Rp 74 miliar.

"Tapi, ini masih ada waktu karena baru September. Se-

dangkan termin ketiga baru November," jelas pejabat asal Buleleng ini.

Ketua Forum Perbekel se-Bali I Gede Pawana, mengakui sejumlah desa sempat ada kebingungan dalam pencairan dana desa. Sebab, regulasi sebelumnya telat, bahkan terjadi revisi. "Sekarang sudah ada. Bahkan sudah ada SKB (surat keputusan bersama) tiga menteri (Menteri Desa, Mendagri, dan Menkeu, Red). Mudah-mudahan selanjutnya proses pencairan dana desa ini lebih gampang," terang Pawana yang juga mantan Kades Duda Timur, dan saat ini sedang mencalonkan diri lagi dalam pemilihan perbekel Duda Timur.

Yang menjadi persoalan tidak hanya pencairan dana desa dari kabupaten/kota kepada desa. Menurut Pawana, juga sempat ada kebingungan dari para kepala desa soal penggunaan dana tersebut. Katanya, begitu dana masuk ternyata penjabaran regulasi untuk penggunaan dananya belum ada.

"Dengan SKB sudah jelas, tahun pertama (2015) penggunaan dana desa sudah jelas. Sebagai prioritasnya adalah untuk infrastruktur," tukasnya.

Sebagai contoh di Duda Timur, dari Rp 280 juta, dana desa itu akan dipakai untuk infrastruktur Rp 120 juta, sisanya untuk bedah rumah, penguatan jalan masuk-masuk banjar di pelosok, dan lainnya.

Abdul Kharis dalam paparannya mengakui, masih ada persoalan dalam tahun pertama pelaksanaan dana desa. Hal ini lantaran regulasi yang juga berubah, termasuk adalah ketakutan desa menggunakan dana tersebut karena pelaporannya yang susah. Namun, setelah adanya pertemuan antara Komisi XI dengan BPK, Menkeu, akhirnya disepakati agar sistem pelaporannya dimudahkan.

"Apalagi, BPK bilang tidak akan memeriksa seluruh kepala desa. Karena tenaga juga tidak ada," tuturnya.

Sebagai trik, dia mengatakan di tahun awal pelaksanaan dana desa, agar program kegiatannya lebih muda, yang parameternya jelas. Sebagai contoh kegiatan fisik, *ngecor* jalan atau gang. Sehingga hitungannya gampang. Sedangkan untuk program pemberdayaan masyarakat, agar bisa di tahun-tahun ke depan, karena parameternya agak susah, dan



Radar Bali

Sambungan

bisa jadi dituding fiktif.

"Pakai saja dulu untuk *ngecor*, jadi hitungannya gampang. Berapa panjang, lebar dan ketebalannya. Kalau pemberdayaan seperti latihan menjahit, maka hitungannya akan susah, berapa jumlah peserta, honorinya berapa, nanti malah dibilang fiktif," paparnya.

"Jadi, di tahun pertama, biar jalan *aja* dulu, cari yang mudah-mudah dulu parameternya," imbuhnya.

Dia mencontohkan di Kabupaten Boyolali, untuk tahun pertama kepala desanya diarahkan bupati agar program kegiatannya serempak pengecoran jalan. Sehingga, laporannya akan sama semua di setiap desa. Dengan cara itu, maka pemeriksaan pun akan mudah. Untuk tahun-tahun selanjutnya, setelah desa sudah lihai menggunakan dana desa, maka dana desa itu bisa dipakai untuk program yang sesuai kebutuhan dan potensi desa.

"Untuk tahun ini dana desa baru 3,32 persen dari dana transfer ke daerah. Tahun 2016 sebesar 6 persen, lalu 2017 sebesar 8 persen, dan 2018 sudah 10 persen," pungkasnya.

Roy Salamony menamabahkan, dengan adanya SKB tiga men-

teri, maka akan diyakini proses pencairan dana desa akan lebih mudah. Sebab, desa hanya perlu APB-Desa. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, sambil dibuat di sela penggunaan dana desa tahun 2015 ini. Namun, dia menegaskan ketentuan ini hanya berlaku di tahun 2015. Untuk 2016, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa dibuat lebih dulu.

Saat membuka seminar yang dihadiri ratusan undangan, di antaranya kades se-Bali itu, Wagub Sudikerta berharap dana desa bisa digunakan semestinya. Dia meminta jangan sampai dipakai untuk ke kafe atau ke karaoke.

"Kalau kepepet, cari *nak loh* (perempuan), jangan lupa helm-nya dipakai. Pakai kondom," seloroh Sudikerta.

Soal pendamping, Pemprov Bali melalui BPMPD Bali saat ini sedang menyiapkan pendamping lokal untuk desa. "Satu orang pendamping lokal untuk tiga desa," tukas Kepala BPMPD Bali Ketut Lihadnyana.

Dengan jumlah desa sebanyak 636, maka setidaknya dibutuhkan 212 pendamping lokal. Selain itu, ada juga pendamping desa di kecamatan dan di kabupaten.

"Eks PNPM sudah dipakai untuk pendamping desa di kecamatan dan kabupaten," papar dia.

Dalam pemaparannya, Prof. Suartana berharap ke depan dana desa ini bisa dipakai untuk pembuatan BUMDes. Namun, dia menggarisbawahi bahwa BUMDes ini tidak bergerak di bidang simpan pinjam, sebab di Bali sudah ada LPD di setiap desa adat. Maka, BUMDes dari dana desa ini mestinya dipakai untuk sektor riil.

"Misal buat hotel atau vila," terang Suartana.

Pembantu Rektor I Unud Prof. I Made Damriyasa dalam sambutannya juga menyatakan, Unud siap menjadi pendamping dalam pengelolaan dana desa. "Tujuannya agar dana desa di Bali tidak ada

yang tidak terserap," tukasnya.

Sementara dari sembilan kabupaten di Bali, Kabupaten Tabanan menjadi daerah paling banyak menerima dana desa. Padahal dari segi jumlah penduduk, luas wilayah dan topografi daerah yang menjadi parameter besar dana desa, lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng. Sedangkan Buleleng lebih kecil dari Tabanan.

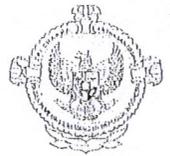
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin, antara

Tabanan dan Karangasem juga sangat jauh. Menurut I Ketut Lihadnyana, besaran alokasi dana untuk setiap desa memang menggunakan parameter di antaranya jumlah penduduk dan luas wilayah. Namun, yang menentukan besaran alokasi dana adalah pemerintah pusat. "Semua pusat menentukan, kami tidak tahu," ungkapnya.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri dalam buku induk kode dan data wilayah administrasi pemerintah, Provinsi Bali mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 185.428.984 untuk sembilan kabupaten di Bali. Kabupaten Tabanan mendapatkan alokasi terbesar Rp 37.068.941, terbesar dibanding kabupaten lain.

Selanjutnya Kabupaten Buleleng mendapatkan dana sebesar Rp 36.812.689. Sedangkan Karangasem mendapatkan dana desa Rp 21.962.811; Bangli (Rp 19.197.775), Gianyar (Rp 19.116.561) Klungkung (Rp 15.260.570), Badung yang menjadi kabupaten dengan PAD terbesar di Bali mendapatkan alokasi dana Rp. 13.826.342. Sementara Jembrana mendapat Rp 12.410.047. Sedangkan yang mendapatkan alokasi dana paling sedikit Kota Denpasar. (yor/bas/yes)

Edisi : Kamis, 17 September 2015
Hal : 39



Radar Bali

Dua Tersangka Dermaga Di-SP3

DENPASAR - Ada kabar heboh di Kejati Bali, setelah aktor utama kasus korupsi dermaga yaitu Wayan Candra dan tim 9 juga divonis. Ternyata Kejati Bali dengan koordinasi dengan Kejari Klungkung, mengeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara, Red). Alias mencabut status tersangkanya. Kabar beredar, landasan SP3 ini mengacu fakta persidangan di Pengadilan Tipikor.

"Ada dua yang status tersangkanya dicabut, sudah terbit SP3-nya," jelas sumber koran ini di Kejati Bali kemarin.

Dia mengatakan kasus Dermaga Gunak-sa bergulir dengan kejutan - kejutan yang dinamis. Dia mengatakan, setelah Candra kemudian tim 9 juga divonis, malah muncul keputusan mengeluarkan SP3. Siapa saja? Dia mengatakan dua orang ini adalah, perempuan yang namanya dipinjam oleh Mantan Bupati Candra untuk membeli lahan. "Dua orang ini dipinjam namanya oleh Candra, untuk mengakui bahwa dirinya sebagai pemilik lahan," ungkapnya.

Mereka adalah Anggara Juni Sari dan Dewa Ayu Budi Arini. Dua orang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya. Namun perannya menjadi samar

► Baca Dua... Hal 39

Dianggap Tak Terima Uang

■ DUA

Sambungan dari hal 29

Bahkan, mereka disebut tidak menerima dana pencairan pengadaan lahan. Bahkan yang mencairkan dana adalah Wayan Tika (Plt Kadishub) dan yang mengambil adalah Sujana saat itu sebagai Camat Dawan. Dan membawakan ke rumah Jabatan Bupati Candra.

"Seperti ini landasan atas munculnya SP3. Sudah jelas dalam fakta persidangan hingga kasus ini divonis untuk terdakwa Candra," imbuhnya. Jika mengacu ke dakwaan, memang disebutkan Candra membeli lahan dengan meminjam nama tersangka Anggara dan I Dewa Ayu Budi Arini. Anggara seolah membeli lahan I Ketut Santog dengan nilai Rp 8 juta per are luas 90 are dengan total Rp 720 juta. Yang dibayar secara bertahap. Sedangkan untuk Dewa Ayu Arini salah membeli lahan I Wayan Saba. Dengan luas lahan luas 22 are dengan harga Rp 8 juta totalnya Rp 176 juta.

Dari pola fiktif ini, Candra mendapatkan dana yang dibayarkan lewat Plt Kadis Perhubungan Wayan Tika. Dan Tika yang membuat SPM (Surat Perintah Membayar). Kemudian dilanjutkan pembayaran bertahap kepada pemilik lahan. Termasuk kepada Candra, pola penyerahan dana itu melibatkan Camat Dawan saat itu I Wayan Sujana setelah meminta dana ke Tika.

Akhirnya Candra mendapat Rp 1,1 miliar atau Rp 1.176.000.000 dari tanah atas nama Anggara. Sedangkan dari Arini juga dengan nilai Rp 1,1 miliar. Akibat perbuatan Candra tersebut, telah merugikan keuangan negara Rp 9,5 miliar atau Rp 9.531.560.000.

Selain dua tersangka ini, ada tiga nama yang memang menggunakan diri sendiri sebagai pembeli. Tiga orang ini juga menjadi tersangka, dan kasusnya masih berjalan. Tiga orang ini adalah Gusti Ayu Ardini Rp 1,9 miliar. IB Susila Rp 2,2 miliar dan Ni Luh Hendrawati Rp 1,7 miliar.

Namun yang menarik, SP3 ini keluar malah jelang Kajari Klungkung diganti dan jelang Kajati Bali pensiun. Hingga kemarin, koran ini belum bisa mengkonfirmasi kabar ini. Hampir 4 jam lebih menunggu penjelasan Aspidsus Kejati Bali Erna Norma, namun tak kunjung keluar. Bahkan disebutkan bahwa sampai sore sekitar pukul 17.00 masih rapat antara Kejati Bali Momok Bambang Sumiarso dengan Aspidsus Erna Norma di ruang Aspidsus Erna Norma. Akhirnya hanya Kasipenkum Kejati Ashari Kurniawan mengatakan bahwa, akan melakukan pengecekan atas kasus ini.

"Saya akan cari info, atas kabar bahwa disebut ada SP3 atas kasus dermaga. Kalau saya sudah dapat penjelasan resmi saya akan hubungi," ungkapnya. (art/yes)

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 29 dan 39



PERPAJAKAN

Pemkot Uji Coba PHR Online

DENPASAR - Guna memudahkan masyarakat dalam urusan administrasi khususnya menyangkut pajak yang selama ini sering kali bermasalah akibat lamanya proses pengurusan. Kini sudah sangat dipermudah dengan sistem berjaringan internet (online). Hal inilah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar untuk mempermudah para pengusaha untuk mengurus pajak PHR (Pajak Hotel dan Restoran) di Kota Denpasar. Bahkan sistem ini kabarnya sudah diujicobakan sejak empat bulan yang lalu. Hal ini juga dimaksud dengan tujuan memudahkan pemerintah dalam pengawasan dan meningkatkan pemasukan daerah khususnya dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di samping juga untuk mengurangi tingkat kebocoran PHR.

Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar, Dewa Nyoman Sumadi mengatakan, sistem jaringan PHR online ini telah dimulai pada empat bulan lalu. Sampai saat ini pelaksanaan dengan menggunakan sistem online masih dalam tahap uji coba yang telah berkerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali. "Jadi sistem ini, perlu diuji coba dulu untuk memastikan kelancaran sistem yang ada, sehingga secara perlahan bisa disempurnakan," ujarnya, saat ditemui di kantornya, Selasa kemarin (15/9).

Nyoman Sumadi mengatakan, penerapan PHR online ini dengan perangkat yang akan disiapkan oleh pihak BPD Bali. Hingga saat ini koordinasi dan komunikasi dengan Bank BPD Bali masih tetap dilakukan lewat uji coba dengan penerapan sistem yang lebih baik lagi. Selain itu juga dikatakan Nyoman Sumadi bahwa sistem ini mendapat respons positif para pengusaha baik restoran dan hotel yang selalu disiplin dan taat dalam melaksanakan pembayaran pajak. "Ini tentu sangat ditunggu juga para pengusaha untuk memudahkan," ujarnya.

Ia juga menyampaikan akan terus melakukan sosialisasi penerapan PHR online ini sehingga dapat berjalan beriringan dengan program penyediaan mesin atau alat dari pihak Bank BPD Bali. "Tujuannya sebenarnya sederhana, yakni memudahkan akses pengawasan serta untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan PHR," ujarnya.

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, salah seorang pengamat ekonomi Universitas Udayana, Gusti Wayan Murjana Yasa mengatakan, penerapan PHR online ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk mempermudah pengusaha, sekaligus juga akan berkaitan erat nantinya dengan trend kunjungan wisatawan. "Tidak hanya sampai di situ, hal ini juga berkaitan dengan peningkatan infrastruktur yang telah dilakukan Pemkot Denpasar sebagai penunjang daya tarik wisata untuk berkunjung di Kota Denpasar," ucapnya. **(hen/rid)**

Edisi : Kamis, 17 September 2015

Hal : 30